

**PERSEPSI LEMBAGA PEMBERI MODAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN UMKM (KOTA PONTIANAK)**

Juanda Astarani

Yosica

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura

ABSTRAKSI

Peliknya persoalan perekonomian yang mendera negeri ini dimana kebutuhan akan pekerjaan meningkat setiap tahunnya, untuk menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan perekonomian yang drastis tersebut, pemerintah membentuk sebuah usaha yang kemudian kita kenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), untuk dapat mendukung usaha tersebut pemerintah daerah Kota Pontianak bekerja sama dengan dinas pemerintah dan bank umum untuk mengeluarkan suatu kebijakan dengan membentuk suatu lembaga yaitu lembaga permodalan yang berfungsi sebagai penyalur kredit modal usaha yang dibutuhkan oleh sektor UMKM. Lembaga permodalan tersebut terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tujuan utama adanya penelitian ini adalah menguji bagaimanakah laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM dan bagaimanakah persepsi dari lembaga permodalan akan kualitas dari laporan keuangan UMKM Kota Pontianak. Penelitian diperoleh berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, berdasarkan hasil akhir penelitian diketahui bahwa sebagian besar UMKM yang ada di Kota Pontianak ini sudah dapat membuat laporan keuangan sederhana yang berkualitas, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dan pembagian kuesioner yang dilakukan terhadap 30 lembaga permodalan dan 10 UMKM, dimana sebesar 91,4% persepsi lembaga permodalan terhadap laporan keuangan UMKM Kota Pontianak termasuk kedalam kategori berkualitas. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh UMKM saat ini khususnya di Kota Pontianak.

Kata Kunci : *UMKM, Lembaga Permodalan, Laporan, Persepsi, Kualitas*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah sosial yang telah dialami Indonesia sejak zaman dahulu, salah satu provinsi di Indonesia yang merasakan permasalahan tersebut adalah Kalimantan Barat khususnya Pontianak, meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak telah mencapai 7% dari angka sebelumnya yang berkisar 2% Namun angka tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Kalimantan Barat Khususnya Pontianak. Angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kota Pontianak mencapai hingga kini sebesar 5% lebih dari pertumbuhan angkatan kerja yang hanya mencapai angka 2%. Angka tersebut dapat terlihat dari tabel asumsi dasar kerangka ekonomi makro kota Pontianak periode 2013 dibawah ini.

ASUMSI DASAR/KERANGKA EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi	6,50% - 7,00%
Inflasi	7,37%
Pertumbuhan Angkatan Kerja	2,66%
Tingkat Pengangguran	5,36% - 4,22%
Angka Kemiskinan	5,26% - 4,80%
IPM	74,51% - 75,55%

Tabel 1.1

(Sumber : APBD Kota Pontianak 2013)

Adanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dipilih pemerintah menjadi salah satu solusi pemecahan masalah yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya Pontianak. Dalam pengembangan kebijakan baru ini, pemerintah dan pemerintah daerah juga bekerjasama dengan, bank umum, dinas Koperasi dan UKM tiap provinsi maupun pihak swasta, kebijakan pemerintah tersebut dalam menggalakan sistem baru ini juga tidak lepas dari peran sektor – sektor pendukung lainnya seperti bank umum dan pihak swasta yang kemudian membentuk sebuah wadah atau lembaga yang melayani kepentingan akan peminjaman modal. Lembaga tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan

[JAAKFE, Desember 2015]

bukan bank, lembaga keuangan bank yaitu seperti ; Bank Swasta maupun Bank Pemerintah, sedangkan lembaga keuangan bukan bank seperti ; *credit union*, pegadaian, koperasi, dan perusahaan asuransi.

Lembaga pemberi modal haruslah dapat memilah badan usaha yang layak dibiayai dan dibina olehnya, lembaga pemberi modal dalam hal ini juga menetapkan beberapa syarat maupun prosedur tertentu agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan dan kelayakan suatu badan usaha dalam pengembalian modal usaha berupa kredit. Salah satu kriteria badan usaha yang memiliki kualifikasi adalah badan usaha yang membuat laporan keuangan secara lengkap dan sesuai standar yang berlaku. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah menetapkan Standar Akuntansi baru untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Peraturan penggunaan SAK ETAP ini ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Suatu entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pendapat lembaga – lembaga pemberi modal di provinsi Kalimantan Barat khususnya di wilayah Kota Pontianak mengenai kualitas laporan

keuangan yang telah dibuat oleh UMKM maka penulis mengambil judul ***“Persepsi Lembaga Pemberi Modal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Kota Pontianak)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penggunaan laporan keuangan pada UMKM di Kota Pontianak ?
2. Bagaimanakah persepsi lembaga pemberi modal terhadap kualitas dari laporan keuangan UMKM?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka batasan penelitian hanya pada permasalahan mengenai penggunaan laporan keuangan di dalam UMKM dan persepsi dari lembaga pemberi modal terhadap kualitas laporan keuangan UMKM kota Pontianak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui bagaimanakah laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM di Kota Pontianak saat ini.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat atau persepsi dari lembaga pemberi modal terhadap kualitas dari laporan keuangan UMKM di Kota Pontianak saat ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi :

[JAAKFE, Desember 2015]

1. Bagi penulis. Penelitian ini berguna untuk memberikan pandangan positif kepada penulis bagaimana membuat atau mendirikan suatu badan usaha yang memiliki kualifikasi yang baik dan berkembang.
2. Bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan bagi wiraswata baru bagaimana mendirikan suatu badan usaha yang memiliki kualifikasi untuk lebih berkembang dengan membuat laporan keuangan secara lengkap sehingga memudahkan bagi UMKM tersebut dalam peminjaman modal usaha.
3. Bagi Akademisi. Dalam hal ini bagi akademisi penelitian ini juga bertujuan menambah pengetahuan para akademisi mengenai bagaimana penggunaan laporan keuangan di dalam UMKM dan bagaimana kualitas dari laporan keuangan yang berkualitas.
4. Bagi Pihak Lain. Bagi pihak lain penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemikiran yang positif, dan masukan yang bermanfaat untuk kedepannya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pengetahuan tentang penggunaan laporan keuangan di dalam UMKM dan bagaimana kaitannya dengan lembaga pemberi modal.

2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Definisi Akuntansi

Ada beberapa definisi dari beberapa ahli mengenai akuntansi. Definisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut : *American Accounting Association* mendefinisikan bahwa: *"Accounting as the process identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information"* "Akuntansi merupakan : Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut" dalam (Wilopo, 2005 : 9) *Accounting Principal Board (APB)* statemen nomor 4 mendefinisikan bahwa : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif dalam (Sofyan, 2008 : 5)

Menurut Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (2007 : 4) mendefinisikan bahwa: Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati dalam bukunya *Warren, Reeve, Fees Accounting (2005:234)*, **akuntansi** adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.

Dalam hal ini akuntansi didefinisikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun, akuntansi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu atau pihak yang berkepentingan dalam bentuk pelaporan keuangan sehingga dapat bermanfaat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperoleh keputusan yang berkaitan dengan prospek di masa yang akan datang.

2.1.1. Sifat Dasar Akuntansi

Ilmu Akuntansi dikatakan sebagai seni ataupun sebagai aktivitas jasa yang mencakup sekumpulan teknik yang dianggap bermanfaat untuk suatu bidang tertentu. Dalam *The Handbook of Accounting* mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan akuntansi yaitu : laporan keuangan, penentuan dan perencanaan pajak, audit independent, system-sistem pemrosesan data dan informasi, akuntansi biaya dan manajemen, akuntansi pendapatan nasional, dan konsultasi manajemen. Dalam hal ini, para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana proses akuntansi. Beberapa pandangan tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Akuntansi Sebagai Sebuah Ideologi
2. Akuntansi Sebagai Sebuah Bahasa
3. Akuntansi Sebagai Catatan Peristiwa Yang Lalu
4. Akuntansi Sebagai Realita Ekonomi Saat Ini
5. Akuntansi Sebagai Sistem Informasi
6. Akuntansi Sebagai Sebagai Komoditas

[JAAKFE, Desember 2015]

2.1.2. Siklus Akuntansi

Gambar 2.1



Siklus Akuntansi

(Sumber : <http://ilmuakuntansi.web.id>)

Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Indra Bastian (2007:76) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi Sektor Publik, mengatakan bahwa: “Siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan.”

Sedangkan pengertian siklus akuntansi menurut menurut Abdul Halim (2007:43) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, mengatakan bahwa: “Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi”. Kesimpulan dari kedua definisi tersebut adalah, siklus akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Soemarso (2006:430) Laporan keuangan (*financial statement analysis*), adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu fenomena.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan tujuannya, laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Sofyan, 2008 : 66)

Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan tahun 2007, PSAK No. 1 laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk kepentingan umum disajikan terpisah atau disajikan dalam dokumen publik seperti laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan APB (*Accounting Principal Board*) pernyataan no. 4, tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut :

1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penggunaan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber – sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan dengan maksud :
 - a. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan
 - b. Menunjukkan posisi keuangan dan investasinya
 - c. Menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya
 - d. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan

[JAAKFE, Desember 2015]

- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud :
 - a. Memberikan gambaran dividen yang diharapkan pemegang saham.
 - b. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, dan mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan.
 - c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.
 - d. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- 3) Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

3. Tujuan Kualitatif

Adapun tujuan kualitatif dari penggunaan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1) *Relevance*

Agar bermanfaat, informasi Laporan keuangan haruslah memiliki informasi yang tepat dan dapat dipercaya.

2) *Understandability*

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah dapat dipahami oleh pengguna.

3) *Verifiability*

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama, kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan usaha.

4) *Neutrality*

Laporan akuntansi itu bersifat netral terhadap pihak – pihak yang berkepentingan. Baik kepada pembuat laporan maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan tersebut.

5) *Timeliness*

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

6) *Comparability*

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

7) *Completeness*

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

2.2.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:106) Laporan keuangan terdiri dari empat laporan dasar, yaitu:

- 1) Neraca, menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban serta modal pada waktu tertentu.
- 2) Laporan rugi-laba, menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu periode tertentu.
- 3) Laporan perubahan modal/laba ditahan, yang memuat tentang saldo awal dan akhir laba ditahan dalam Neraca untuk menunjukkan suatu analisa perubahan besarnya laba selama jangka waktu tertentu.
- 4) Laporan arus kas, memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang dicakup.

[JAAKFE, Desember 2015]

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

1. Usaha Mikro. Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu, Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil. Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah. adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas.

2.4 Lembaga Pemberi Modal

2.4.1 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Jenis-jenis lembaga keuangan bank terdiri dari :

- a. Bank Umum (Konvensional dan Syariah).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional dan Syariah).

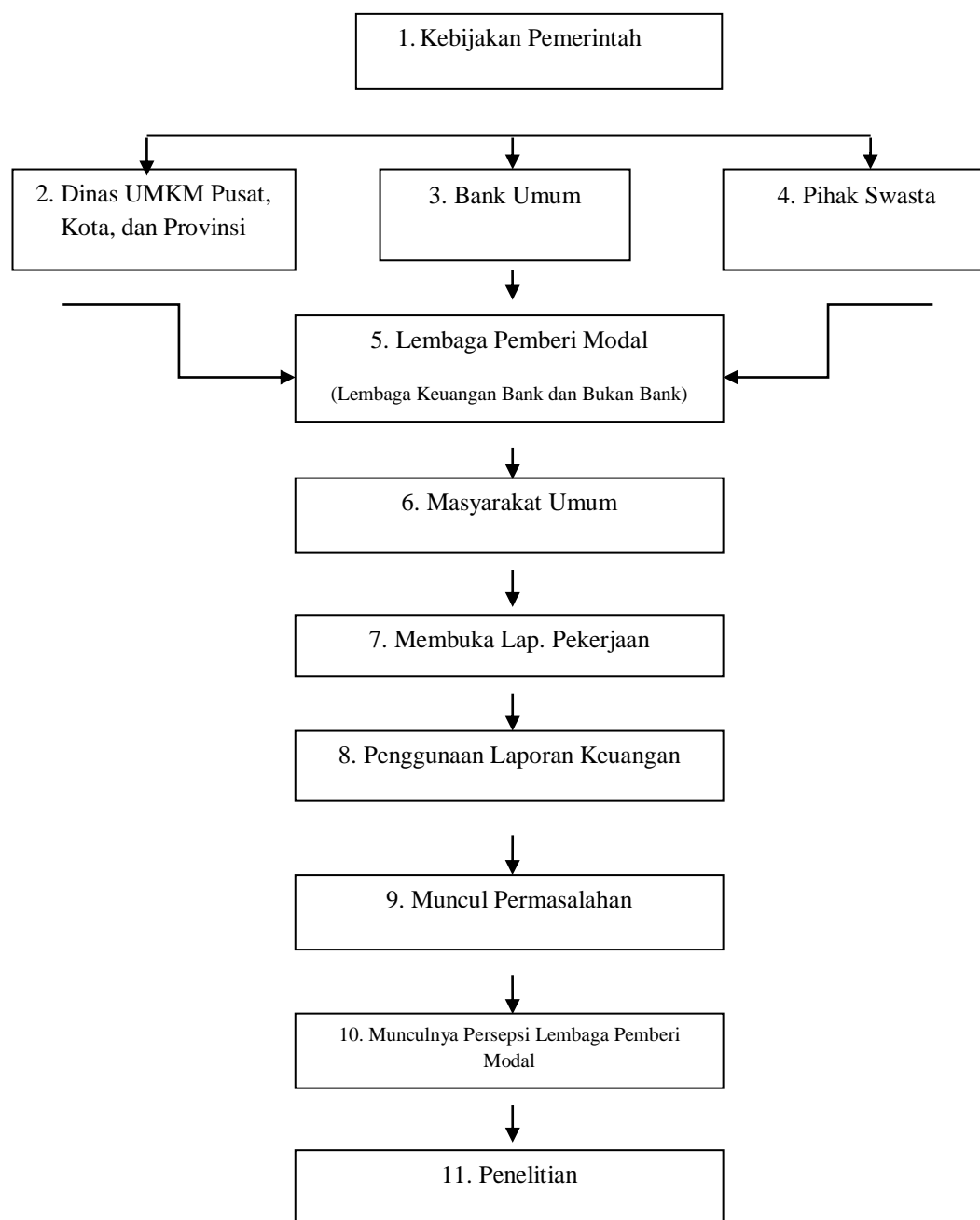
2.4.2 Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*). Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.

2.5 Kerangka Pemikiran

Peranan kebijakan pemerintah bersama dinas UMKM, bank umum dan pihak swasta dalam membentuk lembaga pemberi modal perlu adanya peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan kebijakan tersebut. Lembaga pemberi modal juga menetapkan beberapa persyaratan antara lain dengan pembuatan atau pencatatan laporan keuangan yang benar agar dapat menentukan kriteria UMKM yang layak mendapatkan pinjaman modal maupun yang tidak layak. Namun, penggunaan laporan keuangan ini menimbulkan permasalahan lain dimana pelaku sektor UMKM sebagian besar tidak memiliki kemampuan yang baik dalam penyusunan maupun pencatatan laporan keuangan. Oleh karena itu, lembaga pemberi modal kemudian menetapkan kriteria laporan keuangan yang layak bagi UMKM yaitu sesuai dengan adanya SAK ETAP yang telah disesuaikan untuk lembaga tanpa entitas yaitu UMKM. Dibawah ini adalah merupakan tahapan kerangka pemikiran munculnya penelitian ini.

[JAAKFE, Desember 2015]



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Munculnya Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berasal dari buku-buku, modul perusahaan serta sumber lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi yang ada sekarang ini dan kemudian melakukan evaluasi. Penelitian ini juga dilakukan dengan metode survey, yaitu dengan cara pemberian questioner dengan objek penelitian ini adalah lembaga permodalan bank dan lembaga permodalan bukan bank yang ada di kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan questioner dan mengambil sampel dari 30 objek lembaga permodalan dan 10 UMKM Kota Pontianak sebagai alat pengumpulan data.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah kumpulan atau keseluruhan dari objek penelitian yang penulis ambil Berdasarkan perolehan data dari Bank Indonesia tahun 2014 saat ini tersebar 46 lembaga keuangan bank dan 12 lainnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan populasi UMKM kota Pontianak saat ini berjumlah 273 unit usaha yang masih aktif.

3.2.2 Sampel

Jumlah sampel yang akan diteliti adalah 30 objek lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Hal ini sesuai dengan pedoman yang dianjurkan Gay dan Dehl (1996 : 140 – 141) dalam Mudrajad Kuncoro (2003 : 111). Pedoman ini menjelaskan bahwa untuk studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel untuk bisa meneliti, sedangkan untuk UMKM yang membuat laporan keuangan diambil acak sebanyak 30 lembaga pemberi modal yang terdiri dari 18 lembaga keuangan bank dan 12 lembaga keuangan bukan bank, sedangkan untuk

[JAAKFE, Desember 2015]

UMKM diambil 10 sample UMKM yang ada disekitar lingkungan tempat penulis melakukan penelitian dilihat dari keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian.

Dibawah ini adalah beberapa kriteria sampel UMKM yang penulis ambil sebagai acuan untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Sampel hanya diambil atau diperoleh dari UMKM yang berlokasi di Kota Pontianak. Sampel juga hanya diambil dari lingkungan sekitar tempat tinggal penulis saja, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.
2. Sampel ini hanya diambil dari UMKM pengguna laporan keuangan saja, sampel tidak termasuk koperasi.

Sedangkan kriteria lembaga pemberi modal yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Sampel ini hanya diperoleh dari lembaga permodalan yang merupakan lembaga keuangan bank yaitu bank swasta dan bank pemerintah dan lembaga keuangan bukan bank yang sah seperti pegadaian, CU, koperasi kredit dan BMT.
2. Sampel lembaga pemberi modal hanya diambil dalam wilayah Kota Pontianak, penentuan kriteria sampel ini bermaksud untuk memperoleh sejumlah kepastian dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini terfokus ke lembaga pemberi modal yang ada di Kota Pontianak yang menjadi inti dari penelitian.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. **UMKM Penggunaan laporan keuangan**

Variabel penggunaan laporan keuangan ini terbagi menjadi 2, yaitu :

1. **Pencatatan Laporan Keuangan.**

Dalam pencatatan laporan keuangan pembuat laporan dalam UMKM haruslah membuat laporan sesuai dengan standar yang berlaku saat ini, yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

2. **Pemahaman Terhadap Laporan Keuangan**

Pembuat laporan tidak hanya bisa membuat laporan saja namun ia juga harus dapat memahami maksud dan tujuan laporan tersebut dibuat. Tidak hanya pembuat laporan saja yang harus memahami laporan keuangan ini. Namun, pihak – pihak lain

yang berkepentingan juga harus memahami laporan keuangan tersebut. Pemahaman ini tidak berkaitan dengan latar belakang dari pelaku sektor UMKM namun berhubungan dengan kemampuan atau kesadaran diri dari pelaku sektor UMKM dan pengguna laporan keuangan.

b. Persepsi Lembaga Pemberi Modal

Kualitas dari laporan keuangan yang dimiliki badan usaha ditentukan oleh beberapa hal yang berdasarkan standar laporan keuangan yang benar yaitu : *Relevance* (benar), *Understandability* (dapat dipahami), *Verifiability* (dapat diperiksa), *Neutrality* (netral), *Timeliness* (bermanfaat), *Comparability* (dapat dibandingkan), dan *Completeness* (mencakup semua). Sumber : APB (*Accounting Principal Board*).

TABEL 3.1

TABEL OPERASIONAL VARIABEL

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
1	2	3
Penggunaan Laporan Keuangan	1) Pencatatan Laporan Keuangan	a) Pencatatan transaksi usaha. b) Pembuatan laporan keuangan secara lengkap c) Pembuatan laporan keuangan secara rutin d) Pembuatan laporan modal akhir Usaha e) Pembuatan Anggaran perencanaan usaha
	2) Pemahaman Laporan Keuangan	a) Pemahaman pemilik usaha terhadap laporan keuangan yang telah dibuat b) Pemahaman karyawan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat c) Pemahaman pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat d) Pemahaman akan kegunaan dari laporan

[JAAKFE, Desember 2015]

		<p>keuangan yang telah dibuat</p> <p>e) Pemahaman terhadap tanggung jawab dari laporan keuangan yang telah dibuat</p>
Persepsi Lembaga Pemberi Modal	Kriteria/Kualitas Laporan Keuangan yang Baik	<p>a) Relevance, Laporan keuangan harus memiliki informasi yang tepat dan dapat dipercaya.</p> <p>b) Understandability, Informasi yang telah disajikan harus dapat dimengerti oleh para pembuatnya maupun penggunanya.</p> <p>c) Verifiability, Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain.</p> <p>d) Neutrality, Laporan akuntansi itu bersifat netral.</p> <p>e) Timeliness, Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.</p> <p>f) Comparability, Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan kinerja – kinerja sebelumnya.</p> <p>g) Completeness Informasi akuntansi yang dilaporkan mencakup mengenai semua kebutuhan dari semua pemakai.</p>

Sumber : APB (*Accounting Principal Board*)

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD) dan penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), data dari Dinas (UMKM) Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

3.5 Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber data primer dapat diperoleh dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Pencarian Secara Manual. Sampai saat ini masih banyak organisasi, perusahaan, kantor yang tidak mempunyai data lengkap yang dapat diakses secara online. Oleh karena itu, penulis masih perlu melakukan pencarian secara manual. Cara yang paling efisien ialah dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, dan literature yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti.
2. Pencarian Secara Online. Dengan berkembangnya teknologi Internet maka munculah banyak data base yang menjual berbagai informasi bisnis maupun non-bisnis. Data base ini dikelola oleh sejumlah perusahaan jasa yang menyediakan

[JAAKFE, Desember 2015]

informasi dan data untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Tujuannya ialah untuk memudahkan perusahaan, peneliti dan pengguna lainnya dalam mencari data.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dengan cara, antara lain sebagai berikut :

1. Angket. Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.
2. Observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).
3. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

3.6 Cara Pengukuran Data

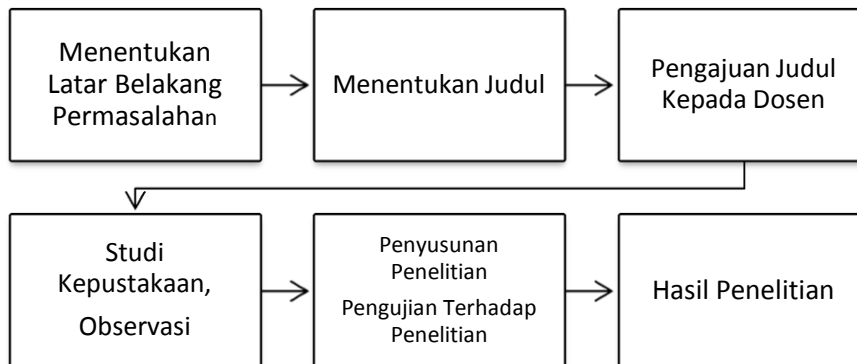
Dalam hal ini cara pengukuran data digunakan dengan penyebaran kuesioner secara acak dan secara deskriptif data tersebut diperoleh dengan adanya wawancara yang dilakukan dengan beberapa lembaga pemberi modal dan mengambil beberapa sampel UMKM yang memiliki kualifikasi laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP untuk UMKM yang telah ditetapkan. Selain itu, wawancara dapat dilakukan sambil mengisi kuesioner secara langsung mengenai keadaan usaha lembaga pember modal dan UMKM yang peneliti ambil sebagai sampel untuk penelitian. Setelah data terkumpul peneliti kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

3.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil di daerah Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, sampel yang di ambil adalah kuesioner yang berasal dari lembaga pemberi modal bank dan lembaga permodalan bukan bank yang memiliki kualifikasi untuk dilakukan wawancara dan pembagian kuesioner.

3.8 Tahapan Penelitian

3.8.1 Tahap Persiapan



Gambar 3.1
Tahapan Persiapan Penelitian

3.8.2 Tahap Pelaksanaan

a. Teknik Pengumpulan Data

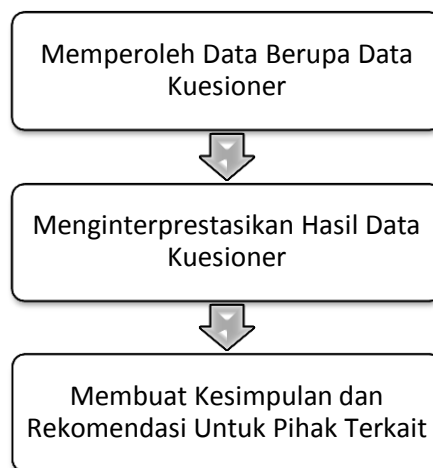
Alat analisis yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah alat analisis deskriptif dan analisis pengaruh antara variabel dimana cara pengukurannya dalam penelitian ini menggunakan analisis Analisis deskriptif, hasil penghitungan akan digolongkan menurut kriteria yang telah ditentukan. Penentuan kriteria tersebut diawali dengan adanya alat analisis yaitu kuesioner. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang pertama dan kedua adalah analisis deskriptif. Pengujian ini dilakukan agar hasil akhir penelitian menjadi tidak bias atau tidak jelas sehingga objek utama dalam penelitian ini tampak jelas yaitu persepsi lembaga permodalan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Tahap Pengolahan

[JAAKFE, Desember 2015]

Prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengolahan data yaitu :

- a. Verifikasi Data dan Tabulasi Data
- b. Pengolahan Data Secara Deskriptif

3.8.3 Tahap Pembahasan



Gambar 3.2
Tahap Pembahasan Penelitian

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penggunaan Laporan Keuangan pada UMKM di Kota Pontianak

Diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan pengetahuan akuntansi baik pemilik maupun staf keuangan/akuntansi UMKM saat ini masih belum memadai. Selain itu, kurangnya kepercayaan antara lembaga permodalan dengan UMKM juga menjadi kendala utama dalam penyampaian informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman pengusaha terkait SAK-ETAP sebagai dasar dalam praktik akuntansi pada UMKM saat ini. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh data mengenai laporan keuangan maupun pencatatan yang telah dilakukan oleh sektor UMKM. Perincian itu kemudian dirangkum menjadi tabel, antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Penggunaan Laporan Keuangan Pada UMKM

No	Nama UMKM/ Tahun Berdiri	Jenis Lap. Keuangan	Menggunakan		Alasan
			Iya	Tidak	
1.	Apotik / Jamu / Obat – obatan (2000)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas	✓		
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
2.	Bengkel / Servis Kendaraan (2007)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas	✓		
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
3.	Depot isi ulang air minum (2000)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas		✓	Tidak punya staf khusus, tidak mengerti.
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti
4.	Foto Copy / ATK (2009)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas	✓		
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
5.	Konveksi / jasa Menjahit (2000)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas		✓	Tidak punya staf khusus, tidak mengerti.
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti
6.	Mini Market	a) Laba	✓		

[JAAKFE, Desember 2015]

	(2010)	Rugi			
		b) Ekuitas	✓		
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
7.	Rental PS (2010)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas		✓	Tidak punya staf khusus, tidak mengerti.
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
8.	Restoran / Rumah Makan (2000)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
9.	Toko Bahan Bangunan (2010)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas	✓		
		c) Neraca		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	Tidak mengerti, merasa belum perlu
10.	Toko Perlengkapan Haji dan Travel (2008)	a) Laba Rugi	✓		
		b) Ekuitas	✓		
		c) Neraca		✓	merasa belum perlu
		d) Arus kas		✓	merasa belum perlu

(Sumber : *Data Hasil Observasi Lapangan 2014*)

Berdasarkan hasil pengamatan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagian besar UMKM sebagai sampel penelitian hanya membuat laporan laba rugi dan sebagian kecil saja yang membuat laporan ekuitas.
2. Sebagian UMKM sampel hanya mengerti pembuatan laporan sederhana yang memuat pemasukan dan pengeluaran sehari – hari saja, mereka belum memahami laporan keuangan selain laporan laba rugi saja.

3. Sebagian besar UMKM sampel memperoleh pinjaman bantuan yang berasal dari BMT maupun Koprasi Usaha, karena tidak membutuhkan laporan yang rumit hanya laporan keuangan sederhana saja.
4. UMKM yang menjadi sampel mengaku, kurangnya tenaga ahli di bidang pembukuan dalam usaha mereka menjadi kendala utama pencatatan laporan keuangan tersebut.
5. UMKM yang menjadi sampel jarang mengikuti penyuluhan yang diadakan pemerintah terkait pencatatan laporan keuangan dengan benar karena kurangnya informasi dari pihak penyelenggara, selain itu UMKM sampel mengaku lebih memilih menjalankan usaha daripada membuang waktu mengikuti penyuluhan maupun seminar pengetahuan tersebut.

Sebaiknya dalam menjalankan usaha setiap usaha besar maupun sektor UMKM, haruslah membuat laporan keuangan sejelas – jelasnya agar lebih mengetahui perkembangan usahanya tiap tahunnya, sehingga dalam pengembangan usaha kedepannya lebih terkontrol dibanding dengan sebelumnya. Dalam menyusun laporan keuangan UMKM yang benar ada langkah-langkah praktis yang sebaiknya dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang harus dipegang oleh UMKM adalah: mencatat seluruh transaksi baik transaksi tunai maupun kredit. Setiap transaksi sebaiknya memiliki bukti transaksi, misalnya kuitansi pembelian, bon penjualan dll.
- 2) UMKM sebaiknya memiliki catatan tersendiri untuk aspek-aspek utama laporan keuangan
- 3) Bilamana diperlukan, UMKM dapat membuat daftar rincian yang lebih detil, seperti catatan persediaan bahan baku menurut jenis, pencatatan Harta Tetap (Aset) per satuan barang (misalnya kendaraan menurut merek dan nomor kendaraannya).
- 4) Saldo-saldo akhir seluruh catatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kerangka Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

Berikut ini adalah daftar beberapa UMKM Kota Pontianak dimana penulis melakukan wawancara dan pembagian kuesioner sebagai bahan acuan tambahan dalam penelitian, peran atau adanya sampel sejumlah UMKM dalam penelitian ini merupakan variabel tambahan untuk memperjelas hasil penelitian adalah sebagai berikut :

[JAAKFE, Desember 2015]

Tabel 4.2

Daftar Sampel UMKM Kota Pontianak

No	Nama UMKM	Alamat	Kota
1.	Depot isi ulang air minum	Jl. Nirbaya	PONTIANAK
2.	Toko Bahan Bangunan	Jl. Uraybawadi Gg. Sentosa no 12	PONTIANAK
3.	Toko Perlengkapan Haji, Travel dan usaha lainnya	Jl. Danau Sentarum Komp. Bank Duta No 1	PONTIANAK
4.	Bengkel / Servis Kendaraan	Jl. Pangeran nata kusuma	PONTIANAK
5.	Mini Market	Jl. Danau Sentarum	PONTIANAK
6.	Foto Copy / ATK	Jl. Sutomo	PONTIANAK
7.	Apotik / Jamu / Obat – obatan	Jl. Prof. M Yamin	PONTIANAK
8.	Konveksi / jasa Menjahit	Jl. Pangeran Nata Kusuma Gg. Jambi No. 7	PONTIANAK
9.	Rental PS	Jl. Alianyang No. 30	PONTIANAK
10.	Restoran / Rumah Makan	Jl. P. Natakusuma No. 135 B/135C	PONTIANAK

(Sumber : Dinas UMKM dan Koperasi)

Dari seluruh hasil penelitian diatas juga ditemukan hal-hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya pencatatan transaksi usaha pada UMKM dengan baik adalah :

1. Adanya anggapan (*mindset*) bahwa pencatatan transaksi belum diperlukan, sehingga bila dilaksanakan akan membuang waktu dan tenaga,
2. Anggapan bahwa pencatatan transaksi tidak banyak bermanfaat dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari,
3. Pengelola usaha lebih fokus terhadap kegiatan produksi, pengelolaan usaha rutin sehari-hari (misalnya belanja barang, mengurus tenaga kerja dll.) dan mengurus transaksi dagangnya, sehingga tidak ada waktu/tidak sempat melakukan kegiatan pencatatan,

4. Terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mengenai cara melakukan pencatatan keuangan,
5. Ada anggapan/ketakutan bahwa dengan pencatatan transaksi yang lengkap akan berakibat pada peningkatan jumlah pengenaan pajak.

4.2. Persepsi Lembaga Pemberi Modal Terhadap Kualitas dari Laporan Keuangan UMKM

Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, setiap lembaga terkait yang dimintai opini pribadinya harus menghasilkan sebuah persepsi atau pendapat mengenai kualitas laporan keuangan UMKM binaan lembaga pemberi modal tersebut. Lembaga – lembaga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.3
Lembaga Keuangan Bank

No	Nama Lembaga	Alamat	Kota
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia	Jl. Barito No. 2	PONTIANAK
2.	PT. BNI Syariah	Jl. Ir. H. Juanda No. 65-66	PONTIANAK
3.	PT. Bank Mandiri Diponegoro (Hub)	Jl. Diponegoro 17	PONTIANAK
4.	PT. BCA Finance	Jl. Perdana Komp. Perdana Square Blok B No.15	PONTIANAK
5.	PT. Bank Ekonomi Raharja	Jl. Ir. H. Juanda 37-39	PONTIANAK
6.	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	Jl. Gusti Sulung Lelanang Komp. Pontianak Mall	PONTIANAK
7.	PT. BRI AGRONIAGA Pontianak	Jl. Ahmad Yani No	PONTIANAK

[JAAKFE, Desember 2015]

		22F	
8.	PD. BPR Bank Pasar Kodya Ptk	Jl. Zainuddin No. 5	PONTIANAK
9.	PT. BPR Centradana Kapuas	Jl. Nusa Indah Baru No. 31	PONTIANAK
10.	PT. BPR Perdana Lintas Khatulistiwa	Jl. Tanjungpura No. 238 A	PONTIANAK
11.	PT. BPR Prima Multi Makmur	Jl. Tanjungpura No. 237 B	PONTIANAK
12.	PT BPR Cemerlang Kapuas Makmur	Jl. Imam Bonjol No. 89	PONTIANAK
13.	PT BPR Sukadana Prima	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 210	PONTIANAK
14.	PT.BPR Universal KalBar	Jl. Imam Bonjol No. 62 D	PONTIANAK
15.	PT. BPR Dana Wira Buana	Jl. Imam Bonjol Gg. Peniti No. 1	PONTIANAK
16.	PT. BPR Ukabima Khatulistiwa	Jl. M. Yamin No. 88A	PONTIANAK
17.	PT. BPR Tamara Dana Khatulistiwa	Jl. Ahmad Yani, Mega Mall	PONTIANAK
18.	PT. BPR Andalan Favorit Perdana	Jl. Ahmad Yani	PONTIANAK

(Sumber : *Bank Indonesia*)

Tabel 4.4
Lembaga Keuangan Bukan Bank

No	Nama Lembaga	Alamat	Kota
1.	PT. Pegadaian	Jl. Hos Cokroaminoto	PONTIANAK
2.	PNM	Jl. Jend. Ahmad Yani No.110A	PONTIANAK
3.	Ulamm	Jl. Dokter Sutomo	PONTIANAK
4.	Cu. Stella Maris	Jl. Gusti Situt Machmud	PONTIANAK
5.	Cu. Keling Kumang	Jl. Hos Cokroaminoto	PONTIANAK
6.	Cu. Pancur Kasih	Jl. Penjara	PONTIANAK
7.	Cu. Khatulistiwa Bakti	Jl. Haji Mursyid I	PONTIANAK
8.	Cu. Muara Kasih	Jl. Antasari	PONTIANAK
9.	Cu. Muara Pesisir	Jl. Tabrani Ahmad, Komp. G.B Khatulistiwa III No. 2	PONTIANAK
10.	Cu. Bina Kasih	Jl. KS Tubun	PONTIANAK
11	PT. Indomobile Finance	Jl. HRA. Rahman Komp. Ruko Sei. Jawi No. 168 B	PONTIANAK
12	Koperasi Simpan Pinjam	Jl. Uray Bawadi	PONTIANAK

(Sumber : *Bank Indonesia*)

a. Hasil Kuesioner

Penulis melampirkan data tersebut kedalam bentuk tabel yang memperlihatkan hasil presentase jawaban yang diperoleh dari lembaga – lembaga pemberi modal tersebut berdasarkan karakteristik umum yang dimiliki oleh laporan keuangan sebagai tolak ukur dari laporan keuangan yang berkualitas yaitu : *Relevance, Understandability, Verifiability, Neutrality, Timelines, Comparability*, dan *Completeness* yang bersumber dari APB (*Accounting Principal Board*).

[JAAKFE, Desember 2015]

Tabel 4.6
Jawaban Responden Terhadap Kualitas laporan keuangan UMKM

Pertanyaan	Jumlah Responden			
	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1. Apakah laporan keuangan yang dimiliki UMKM binaan anda memiliki informasi yang tepat dan dapat dipercaya (<i>Relevance</i>)	30	100%	-	-
2. Apakah informasi yang diperoleh dari laporan tersebut dimengerti oleh UMKM pembuat laporan tersebut (<i>Understandability</i>)	25	83,3%	5	16,7%
3. Apakah hasil laporan keuangan tersebut dapat diverifikasi oleh pihak lain selain pihak UMKM (<i>Verifiability</i>)	27	90%	3	10%
4. Apakah laporan usaha dari UMKM tersebut bersifat netral (<i>Neutrality</i>)	30	100%	-	-
5. Apakah laporan keuangan UMKM tersebut dapat digunakan saat lembaga anda perlukan (<i>Timelines</i>)	28	93,3%	2	6,7%
6. Apakah laporan keuangan UMKM tersebut dapat dibandingkan dengan kinerja – kinerja sebelumnya (<i>Comparability</i>)	27	90%	3	10%
7. Apakah laporan keuangan UMKM tersebut sudah mencakup semua kebutuhan informasi yang pihak anda butuhkan untuk pemberian kredit (<i>Completeness</i>)	25	83,3%	5	16,7%
Total Presentase		91,4%		8,6%

(Sumber : *Data Observasi Lapangan*)

Perhitungan diatas diperoleh dari :

$$\text{Presentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah responden}}{\text{Total Responden}} \times 100$$

Tabel 4.7

Kategori Jawaban Berdasarkan Interval

Kategori Jawaban	Interval
Sangat Berkualitas	90%-100%
Berkualitas	80%-89%
Cukup Berkualitas	65%-79%
Kurang Berkualitas	55%-64%
Tidak Berkualitas	0% - 54%

(Sumber : *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*)

Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner lembaga pemberi modal terhadap kualitas laporan keuangan UMKM sebesar 91,4 % menjawab ya yang berarti bahwa laporan UMKM binaannya adalah termasuk berkualitas berdasarkan dengan standar penilaian kelayakan suatu laporan keuangan. Semua lembaga pemberi modal baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengambil resiko atas tanggung jawab yang mereka berikan kepada UMKM binaannya, namun tak lantas mereka membiarkan usaha tersebut berjalan tanpa pengontrolan khusus dari pihak lembaga, hal tersebut dikarenakan belum lancarnya kemampuan rata-rata pengembalian kredit usaha oleh sektor UMKM. Lembaga pemberi modal juga memberikan beberapa pelatihan sederhana tentang pengelolaan modal yang dipinjamkan tersebut dan untuk itu

[JAAKFE, Desember 2015]

sektor UMKM diharuskan untuk masuk menjadi anggota lembaga pemberi modal tersebut.

b. Hasil Wawancara

Dari hasil penelitian dengan metode lainya yaitu melalui wawancara kuesioner, berdasarkan 10 (sepuluh) pertanyaan yang diajukan kepada 30 (tiga puluh) lembaga pemberi modal menunjukan bahwa kebijakan lembaga lebih berpengaruh besar dibandingkan dengan persepsi pribadi perorang di dalam lembaga permodalan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang kedalam peraturan sah yang ada di dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan yang terdapat di lembaga pemberi modal berdasarkan hasil wawancara kuesioner yang diperoleh penulis, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Sektor usaha yang didanai tersebut haruslah menjadi anggota terlebih dahulu pada lembaga tersebut.
2. Sektor usaha tersebut haruslah memeperoleh pelatihan khusus yang akan diberikan setelah menjadi anggota tetap dari lembaga tersebut.
3. Sektor usaha yang masuk menjadi anggota harus telah menjalani usaha tersebut minimal 1 tahun.
4. Sektor usaha yang masuk menjadi anggota tidak boleh memiliki ikatan kontrak lain dengan lembaga permodalan lain.
5. Sektor usaha yang masuk menjadi anggota harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap usaha yang dijalaninnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. *The Handbook of Accounting*
- Abubakar, Arif dan Wibowo. 2005. *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. PT Grasindo, Jakarta.
- Adi, M. Kwartono. 2009. *Kiat Sukses Berburu Modal UMKM*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Batik Di Siduarjo*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya
- Badan Pusat Statistik. 2014. (<http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 30 Maret 2014)
- Charles T. Horngren dan Walter T. Horison Jr. 2007. *Akuntansi Jilid Satu*. Edisi Tujuh. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Darsono dan Anshari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Grace. 2003. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyiapan Dan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Jawa Tengah*. Thesis UNDIP. Semarang.
- Hadiyahfitriyah. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Pengalaman Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Dengan Variabel Pemoderisasi Ketidakpastian Lingkungan Pada Manajer/Pemilik UKM*. Skripsi UNAIR. Surabaya

[JAAKFE, Desember 2015]

Hilda. 2006. *Akuntansi Dan Pengendalian Intern Untuk UKM*. Jurnal Akuntansi Vol 9. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil & Menengah*. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta. 2009

Jogiyanto. 2007 *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE

Muhammad, Wahyudi. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Yogyakarta*. Thesis UNDIP, Semarang.

Pramiyanti, Alila. 2008. *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Pramono, Peni R. 2007. *Membuat Laporan Keuangan Perusahaan Segampang Milik Warung Sebelah*. PT. Elex Media Komputindo.

Rudiantoro, Siregar. 2011. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETA*. Universitas Indonesia, Jakarta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Jakarta

Standar Akuntansi Keuangan. 2004. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

S.R. Soemarso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.